LAPORAN SINGKAT

RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VI DPR RI
BIDANG PERDAGANGAN, KAWASAN PERDAGANGAN DAN PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA, DAN BUMN

Rapat ke	:	8 (Delapan)
Tahun Sidang	:	2024-2025
Masa Persidangan	:	I
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS Sabang) dan Wakil Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam).
Hari, Tanggal	:	Rabu, 6 November 2024
Pukul	:	14.00 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	Eko Hendro Purnomo, S.Sos/Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dewi Pusporini, S.T., M.E., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	:	1. Perkenalan Mitra Kerja Komisi VI DPR RI; 2. Penjelasan Mitra Kerja terhadap Program Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025; dan 3. Target Penyelesaian Roadmap Kementerian/Lembaga.
Hadir	:	1. 34 orang dari 46 orang Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Sdr. Iskandar Zulkarnaen; 3. Plh. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Sdr. Purwiyanto Beserta Jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib yang tertuang dalam Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 276 ayat (1), maka Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada pukul 14.59 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari Rabu, 6 November 2024, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dibuka oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, yakni Bapak Eko Hendro Purnomo, S.Sos. Rapat di skors selama 5 menit. Skors dicabut, Rapat dilanjutkan kembali pada pukul 15.30 WIB.

3. Rapat Dengar Pendpat Komisi VI DPR RI dihadiri oleh Ketua Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. Untuk Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) akan dijadwalkan kemudian.

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VI DPR RI bersama Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) sepakat untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPKS.

2. Komisi VI DPR RI mendorong Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) untuk dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran tahun 2025 sesuai dengan program yang telah ditetapkan dalam rangka peningkatan kinerja BPKS dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

3. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) terkait usulan tambahan anggaran tahun 2025 sebesar Rp.73.026.000.000,- (*Tujuh Puluh Tiga Miliar Dua Puluh Enam Juta Rupiah*).

4. Komisi VI DPR RI mendorong Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
   a. meningkatkan perencanaan dan pengelolaan Kawasan Sabang secara profesional, transparan dan akuntabel.
   b. merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan pola kemitraan lintas Kementerian/Lembaga, BUMN, Swasta dan sektor terkait lainnya.

5. Komisi VI DPR RI mendukung kawasan Sabang untuk dijadikan hub logistik di Indonesia seperti di Bitung, Ambon, Sorong dan kawasan lainnya di Indonesia.

6. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja atas pertanyaan Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 16.37 WIB.

KEPALA **BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN SABANG** **(BPKS SABANG)**	**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI** **KETUA RAPAT,**
TTD.	**TTD.**
ISKANDAR ZULKARNAEN	**EKO HENDRO PURNOMO, S,Sos** **A-499**